



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,



**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

**Perincian biaya**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2004, di Pulau Kukusan Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj., tanggal 23 Mei 2023 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tamrin bin Tarawe) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Muhamad Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

*Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian/keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Husen bin Abdul Karim) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Ahmad bin Abdurachman Dq Maloqa) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Tamrin bin Tarawe) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Muhamad Hasan) telah dinikahkan oleh wali nasabnya;
2. Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan Yakub, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Agustus 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nurdiana binti Muhamad Hasan yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe berstatus Perjaka dan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan Yakub, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak dikarunia anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Husen dan Yakub;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon tidak dikarunia anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

*Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon tidak dikarunia anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
2. Ahmad bin Abdurachman Dq Maloqa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2004 di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Muhamad Hasan;
  - Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

*Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*





## **B. Saksi:**

1. Husen bin Abdul Karim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2004 di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Muhamad Hasan;
  - Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Husen dan Yakub;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

*Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*





Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 13 Agustus 2004 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050107790240, atas (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5309096111830001 atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

*Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe berstatus Perjaka dan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan Yakub, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak dikarunia anak;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak bercerai dan Pemohon I Tamrin bin Tarawe tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Tamrin bin Tarawe dan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan Kasim adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang

*Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tamrin bin Tarawe**, NIK 5315050107790240, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**, NIK 5309096111830001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Agustus 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nurdiana binti Muhamad Hasan yang dilangsungkan di pulau Kukusan;

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Isbat Nikah



**PENETAPAN**  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

**Pemohon I:**

**Tamrin bin Tarawe**

**Pemohon II:**

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**

Senin, 12 Juni 2023 M  
23 Zulqaidah 1444 H

**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II**

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235  
e-mail : [pengadilan@pa-labuanbajo.go.id](mailto:pengadilan@pa-labuanbajo.go.id)  
website : [www.pa-labuanbajo.go.id](http://www.pa-labuanbajo.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tamrin bin Tarawe) dengan Pemohon II (Nurdiana binti Muhamad Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, lalu Hakim Tunggal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

Hakim Tunggal

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**



istbat nikah?

Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon tidak dikarunia anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, setahu saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I, beragama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta





Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Husen dan Yakub;

Apakah saudara mengetahui mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Bagaimana saudara saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri;

Dimana para Pemohon hidup layaknya suami istri?

Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?



Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallaahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal kepada saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2004 di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah saudara hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Iya, saya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan;

Apakah saudara mengetahui siapa saksi nikah pada pernikahan



Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

Setelah dimintai keterangannya, saksi pertama para Pemohon diperintahkan untuk duduk di belakang dalam ruang sidang dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang kedua dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama Ahmad bin Abdurachman Dq Maloqa, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Kecamatan Komodo Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur;

Apakah status Pemohon I dan Pemohon II  
pada saat menikah?

Ya, saat menikah Pemohon I  
berstatus perjaka sedangkan  
Pemohon II berstatus perawan;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II  
telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para  
Pemohon tidak dikarunia anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan  
Pemohon II memiliki hubungan  
pernikahan dengan yang lain?

Tidak, sejauh saya saat ini Pemohon  
I hanya memiliki seorang istri yaitu  
Pemohon II sedangkan Pemohon II  
hanya memiliki seorang suami yaitu  
Pemohon I, beragama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II  
memiliki hubungan nasab, semenda  
atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak  
memiliki hubungan nasab, semenda  
atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan  
atas pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang  
keberatan atas pernikahan Pemohon  
I dan Pemohon II;



Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan;

Apakah saudara mengetahui siapa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Husen dan Yakub;

Apakah saudara mengetahui mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Bagaimana saudara saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri;

Dimana para Pemohon hidup layaknya suami istri?

Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang,



Selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II agar memasuki ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama Husen bin Abdul Karim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal dan saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2004 di Pulau Kukusan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah saudara hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Iya, saya menyaksikan pernikahan



42

Telah dinazeglen dan dicocokkan  
dengan aslinya diberi kode .....

p2 12/06/23

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NIK : 5309096111830001

Nama: NURDIANA  
Tempat/Tgl Lahir: P. LONGOS, 21-11-1983  
Jenis kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah  
Alamat: PULAU KUKUSAN  
RT/RW: 005/005  
Kad/Desa: PASIR PANJANG  
Kecamatan: KOMODO  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan: WHI  
Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP

MANGGARAI BARAT  
03-10-2022

*[Signature]*

Telah dilakukan Pendaftaran Kewarganegaraan  
Sesuai Dengan Peraturan  
Menteri Kewarganegaraan RI No. 12/2014  
Tentang Pendaftaran Kewarganegaraan  
Menteri Kewarganegaraan RI  
(/s/ ...)  
Menteri  
Menteri  
Tanda Tangan

12 JUN 2023

METERAI TEMPEL  
39F54AKX312672751

IREAKH H. S. SABILLAH  
NIPPOS: 900492636

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah dinazeglen dan dicocokkan  
dengan aslinya diberi kode 12/06/23



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah);

Kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

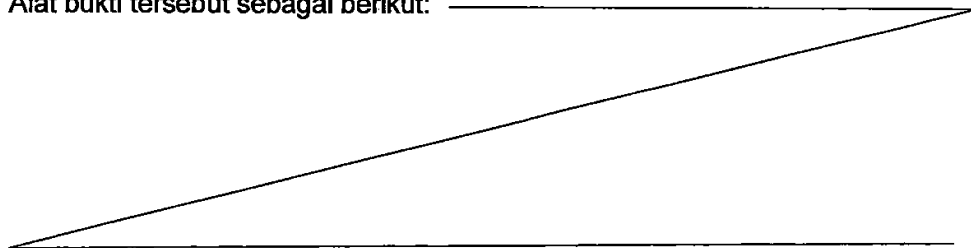
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Hakim Tunggal, para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050107790240, atas nama Tamrin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5309096111830001, atas nama Nurdiana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Alat bukti tersebut sebagai berikut:





BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tamrin bin Tarawe**, NIK 5315050107790240, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**, NIK 5309096111830001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**

Susunan Hakim Tunggal yang bersidang:

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu  
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

TELAH MEMANGGIL

Tamrin bin Tarawe, NIK 5315050107790240, tempat dan tanggal lahir kukusan, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

untuk pemeriksaan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I

Tamrin

Tamrin bin Tarawe

Jurusita Pengganti,

Devis Aji Pratama

Devis Aji Pratama, S.H.





RELAAS PANGGILAN  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

TELAH MEMANGGIL

Nurdiana Binti Muhamad Hasan, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 21 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kukusan, Rt 005 Rw 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT

untuk pemeriksaan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon II

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon II

Pemohon II

Nurdiana Binti Muhamad Hasan

Jurusita Pengganti,

Devis Aji Pratama, S.H.





## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anggota majelis yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan Fit and Propertes Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II maka perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E ..... Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Labuan Bajo

Pada tanggal 05 Juni 2023

Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUMUMAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj**

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 saya Devis Aji Pratama, S.H.,  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua  
Majelis perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang  
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05  
Juni 2023 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan  
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Tamrin bin Tarawe, NIK 5315050107790240, tempat dan tanggal lahir kukusan,  
01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan,  
pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 005  
RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur, sebagai Pemohon I.

Nurdiana binti Muhamad Hasan, NIK 5309096111830001, tempat dan tanggal  
lahir Pulau Longos, 21 November 1983, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa  
Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
sebagai Pemohon II.

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari 12 Juni 2023  
bertempat di kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa  
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke  
Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

  
Jurusita Pengganti,  
  
Devis Aji Pratama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
  - Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

**Tamrin bin Tarawe**, NIK 5315050107790240, tempat dan tanggal lahir kukusan, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**, NIK 5309096111830001, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 21 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** pukul **09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo**;
- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Panitera  
  
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

### MENUNJUK

Saudara Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Panitera,



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## MENETAPKAN

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Ketua Majelis;
  2. Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota;
  3. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, NTT, 86554

**KWITANSI**

Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM )

Nomor Perkara : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
a. Nama : Tamrin bin Tarawe  
b. Panjar Biaya Perkara : Rp.0 (nol rupiah)  
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Kasir,  
  
Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

**CATATAN :**

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 tanggal 30 November 2022 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

1. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA 005.04.2.682282/2023, tanggal 30 November 2022 TA 2023;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

**MUSTAPA, S.H.**

**NIP. 197012311992031007**





## PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.



Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,M.E



## PERTIMBANGAN PANITERA

Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Pemohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Tamrin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2023, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KECAMATAN KOMODO  
DESA PASIR PANJANG**

*Alamat : Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kode Pos 86763*

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor : Pem.140.1 N. / DPP /046 / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURDIN**  
Jabatan : Kepala Desa Pasir Panjang  
Alamat : Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang Kec. Komodo Kab.Manggarai Barat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Tamrin**  
NIK : **53150 501 07 790240**  
Tempat/Tgl Lahir : **Kukusan / 01-07-1979**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Melayan**  
Alamat : **Pulau Kukusan, Rt/Rw. 005-005**

Benar – benar terdaftar dalam buku Register Penduduk Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terdaftar sebagai Kepala keluarga kurang mampu/ ekonomi lemah.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KELUARGA**

No	Nama	NIK	Tempat /tanggal lahir	J/K	Pekerjaan	Ket
1.	Tamrin					
2.	Nurdiana					
3.						
4.						
5.						

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Rinca,  
Kepala Desa Pasir Panjang



Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tamrin bin Tarawe**  
Umur : 43 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD  
Alamat : Kukusan, RT005 RW005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : **Nurdiana binti Muhamad Hasan**  
Umur : 39 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD  
Alamat : Kukusan, RT005 RW005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Tamrin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pemohon I

**Tamrin bin Tarawe**

Pemohon II

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kuskusan, pada 13 Agustus 2004 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I

Tamrin bin Tarawe

Pemohon II

Nurdiana binti Muhamad Hasan "



berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak dikarunia anak;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak bercerai dan Pemohon I Tamrin bin Tarawe tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Tamrin bin Tarawe dan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan Kasim adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :





NOMOR : 42 /Pdt.P/ 2023 /PA.Lbj
TANGGAL : 23 -05 - 2023

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kepada:

Yth.Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Tamrin bin Tarawe, NIK 5315050107790240, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Nurdiana binti Muhamad Hasan, NIK 5309096111830001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 005 RW 005, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Agustus 2004 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nurdiana binti Muhamad Hasan yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Tamrin bin Tarawe berstatus Perjaka dan Pemohon II Nurdiana binti Muhamad Hasan berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Hasan, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan Yakub, ijab kabul dan mas kawin





## DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan Pemohon	23 Mei 2023	3 Lembar
2.	Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	23 Mei 2023	1 Lembar
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	19 Mei 2023	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Mei 2023	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran	23 Mei 2023	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis	23 Mei 2023	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera Pengganti	23 Mei 2023	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita	23 Mei 2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Mei 2023	2 Lembar
12.	Pengumuman	23 Mei 2023	1 Lembar
13.	Penetapan Hakim Tunggal	05 Juni 2023	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Para Pemohon	06 Juni 2023	2 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	12 Juni 2023	Hal. 1 s/d 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



### BERKAS

**N O M O R** : 42/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
**JENIS PERKARA** : Isbat Nikah  
**TANGGAL DAFTAR** : 23 Mei 2023

### DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

### YANG DIAJUKAN OLEH

**Tamrin bin Tarawe**  
(Sebagai Pemohon I)

**Nurdiana binti Muhamad Hasan**  
(Sebagai Pemohon II)

### PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

**TANGGAL :** 12 Juni 2023 Miladiyah  
23 Zulqaidah 1444 Hijriyah

**TANGGAL MINUTASI :** 12 Juni 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)